



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2025-2029**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah berisikan serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi. Kami menyadari bahwa Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bekasi, 19 September 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI**



Des. DWY SIGIT ANDRIAN,MM
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 197606161996031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BEKASI.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kabupaten Bekasi.....	8
2.1.1 Struktur Organisasi.....	8
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	14
2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi.....	18
2.4 Mitra Dalam Pemberian Layanan.....	20
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	24
2.6.2 Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.....	25
2.6.3 Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.....	27
2.6.4 Telaahan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	29
2.6.5 Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional, Regional dan Lokal..	31
2.6.5.1 Isu Global.....	31
2.6.5.2 Isu Nasional.....	35
2.6.5.3 Isu Regional.....	39
2.6.5.4 Isu Strategis Kabupaten Bekasi.....	44
2.6.6 Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi.....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi.....	47



3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi.....	49
3.2.1	Strategi.....	50
3.2.2	Arah Kebijakan.....	51
3.3	Pohon Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	52
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.....	66
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan.....	66
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	83
BAB V	PENUTUP.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang.....	14
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan.....	15
Tabel 2.5.	Aset, Sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Bekasi.....	17
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2024.....	19
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2024.....	20
Tabel 2.8.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	24
Tabel 2.9.	Hasil Analisa TPB Tahun 2023.....	30
Tabel 2.10.	Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi.....	46
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi.....	48
Tabel 3.2.	Tahap Perencanaan Pembangunan Bappeda Kab. Bekasi 2025-2029.....	49
Tabel 3.3.	Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal.....	50
Tabel 3.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
Tabel 3.5.	Merumuskan Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 berdasarkan Isu Strategis (Level I).....	55
Tabel 3.6.	Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 (Level II).....	55
Tabel 3.7.	Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 (Level 3).....	57
Tabel 3.8.	Cascading Kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	59
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	67
Tabel 4.2.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi 2025-2029.....	70
Tabel 4.3.	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	76
Tabel 4.4.	Program Pembangunan Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	83
Tabel 4.5.	Keselarsan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 Dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	84
Tabel 4.6.	Target Indikator Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.....	85
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2.1	Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Bekasi.....	9
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi.....	10
Gambar 2.3	Lokasi Gedung Bappeda Kabupaten Bekasi.....	16
Gambar 2.4	Visi Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045.....	26
Gambar 2.5	Hubungan RPJPD 2025-2045 dengan Renstra.....	27
Gambar 2.6	Hubungan RPJMD 2025-2029 dengan Renstra.....	29
Gambar 2.7	Alur Penetapan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi.....	45
Gambar 3.1	Tahapan Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	54
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra.....	66
Gambar 4.2	Alur Proses Cascading Kinerja/Sasaran Perangkat Daerah.....	86



B A B

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menegaskan komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Bekasi, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berisikan uraian perencanaan teknis operasional dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bekasi, dan berasal dari penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan

maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra PD bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bekasi adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Bappeda beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bappeda.



- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bekasi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi

Pada bab ini terdapat 6 (enam) sub bab, yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kabupaten Bekasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten



Bekasi, Mitra Dalam Pemberian Layanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dan Permasalahan dan Isu Strategis dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kabupaten Bekasi

Sub bab ini menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data lain yang relevan.

Penyajian pada sub bab ini paling sedikit memuat:

2.1.1. Struktur Organisasi

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bekasi

Sub bab ini berisi informasi mengenai potensi yang dimiliki oleh perangkat daerah untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menyusun, mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyajian pada subbab ini paling sedikit memuat:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi

Sub bab ini memuat kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi berdasarkan kewenangannya di bidang perencanaan.

2.4. Mitra Dalam Pemberian Layanan

Sub bab ini berisi uraian mengenai pihak-pihak yang menjadi mitra kerja Bappeda dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Sub bab ini memuat identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Penyajian sub bab ini dengan rincian memuat:

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

2.6.2. Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahun 2025-204



- 2.6.3. Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
- 2.6.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
- 2.6.5. Telaahan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2.6.6. Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional, Regional dan Lokal..
- 2.6.7. Isu Global
- 2.6.8. Isu Nasional
- 2.6.9. Isu Regional.
- 2.6.10. Isu Strategis Kabupaten Bekasi
- 2.6.11. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab, yang berisi tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Arah Kebijakan dan Pohon Kinerja Rencana Strategis perangkat daerah

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Selain itu dijelaskan mengenai target dan rencana pendanaan perangkat daerah selam 5 (lima) tahun.

BAB V Penutup

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

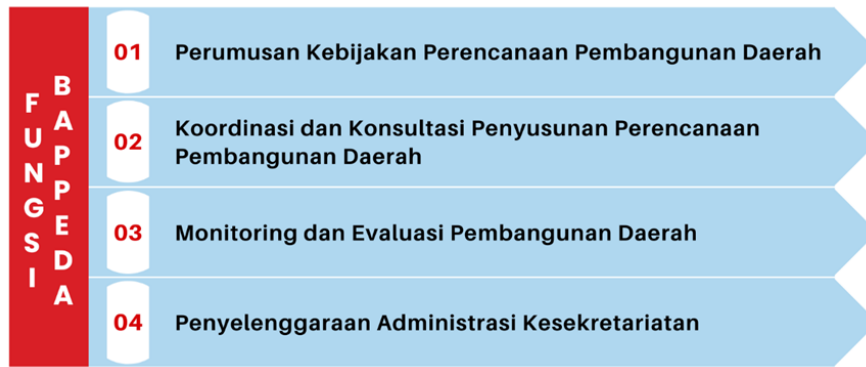
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Bappeda Kabupaten Bekasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi berkedudukan sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan Perencanaan dan Pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024);.
2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

2.1.1 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi yang meliputi bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan sebagai berikut:



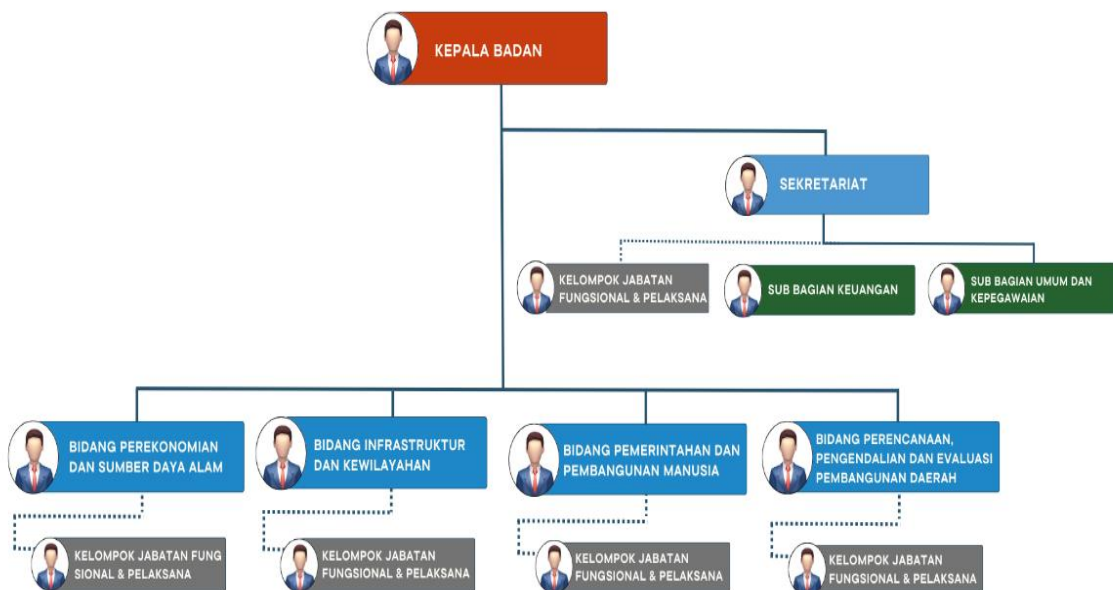
Gambar 2.1. Fungsi Bappeda Kabupaten Bekasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pendanaan, Data dan Informasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pemerintahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pembangunan Manusia;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan fungsi Perekonomian;

2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Ekonomi Kreatif;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Kebinamargaan dan Perhubungan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Keciptakaryaan Kewilayahan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Tugas Pokok : Merumuskan Kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan konsultasi penyusunan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Fungsi : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.

2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.

4. Pembinaan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

B. Sekretaris

Tugas Pokok : memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



- Fungsi :
1. pengoordinasian rencana program dan kegiatan serta pengoordinasian penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup Badan;
 2. pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan
 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Sekretariat Badan;
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tugas Pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

- Fungsi :
1. Perencanaan operasional urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 2. Penyelenggaraan program urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 3. Pembagian pelaksanaan tugas, pemberian petunjuk dan penyeliaan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 4. Pengaturan, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tugas Pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

- Fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



2. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tugas Pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.

- Fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.

F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tugas Pokok : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

- Fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.



G. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok : Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan dan memiliki tanggungjawab koordinatif kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

H. Kelompok Jabatan Pelaksana

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, bertanggungjawab secara langsung kepada Jabatan Administrasi di atasnya atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim kerja.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bekasi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Bekasi berdasarkan data sampai Tahun 2025 berjumlah 54 orang Pegawai Negeri Sipil dari jumlah total kebutuhan pegawai sebanyak 71 orang. Adapun komposisi pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan, tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	25 Orang
2	Perempuan	29 Orang
	Jumlah	54 Orang

Sumber: Aplikasi Kepegawaian BISMA Tahun 2025

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	IV	7 Orang
2	III	28 Orang
3	II	2 Orang
4	IX	10 Orang
5	V	5 Orang
6	I	2 Orang
	Jumlah	54 Orang

Sumber Data : Aplikasi Kepegawaian BISMA Tahun 2025



Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana (S2)	18 Orang
2	Sarjana (S1)	26 Orang
3	Diploma (D3)	1 Orang
4	SMA	7 Orang
5	SD	2 orang
	Jumlah	54 Orang

Sumber : Aplikasi Kepegawaian BISMA Tahun 2025

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, tingkat pendidikan aparatur Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-2 dan S-1 sebanyak 44 orang atau 81,48% dari total pegawai.

Dengan rata-rata tingkat pendidikan aparatur Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah aparatur Bappeda yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 26 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 48,15% dari seluruh aparatur Bappeda.

Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tank*-nya Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Pegawai	Kekurangan/Kelebihan
1	Esselon II	1 Orang	1 Orang	-
2	Esselon III	5 Orang	5 Orang	-
3	Esselon IV	2 Orang	2 Orang	-
4	Jabatan Fungsional Perencana (Ketua Tim)	13 Orang	9 Orang	(-) 4 Orang
5	Jabatan Fungsional	40 Orang	19 Orang	(-) 21 Orang
6	Jabatan Pelaksana	10 Orang	17 Orang	(+) 7 Orang
	Jumlah	71 Orang	54 Orang	(-) 18 Orang

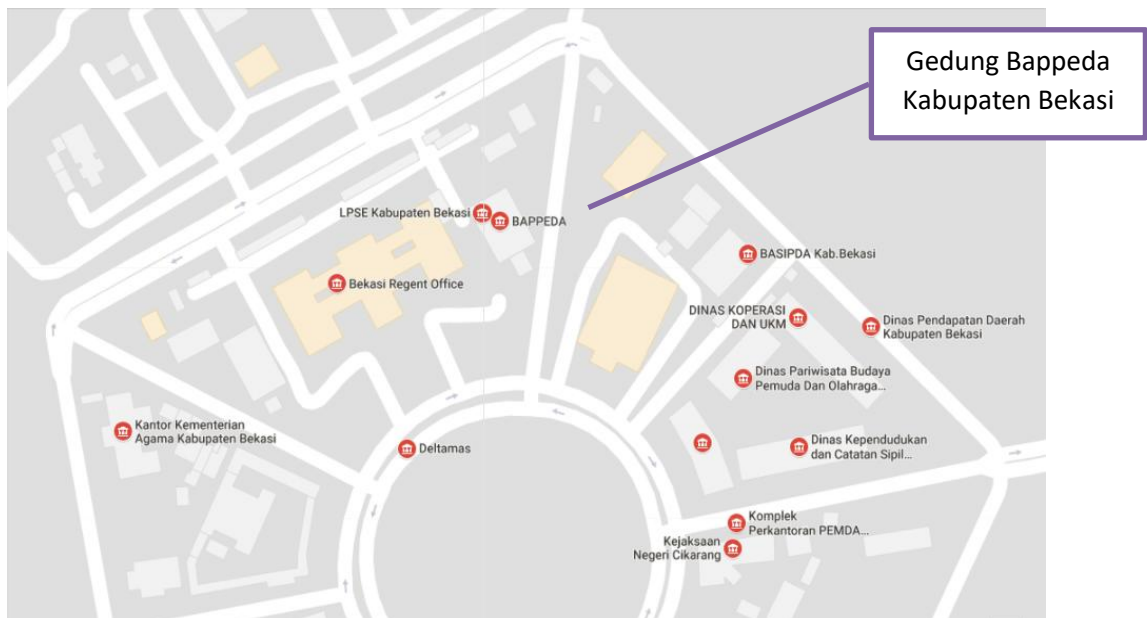
Sumber: Aplikasi Kepegawaian BISMA Tahun 2025

Dalam Tabel 2.4 dijelaskan kondisi jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jenjang Jabatan, terlihat bahwa secara keseluruhan Bappeda mengalami kekurangan pegawai. Yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan SDM Bappeda Kabupaten Bekasi antara lain:

- a. Perlu adanya penataan pegawai melalui pengalihan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional Perencana melalui uji kompetensi sehingga dapat lebih mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas Bappeda sebagai badan perencana daerah.
- b. perlu adanya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencana dan SDM tenaga administrasi, baik dari segi Tingkat Pendidikan maupun Kompetensi nya.

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi berlokasi di dalam kompleks pemerintahan Kabupaten Bekasi dan terdapat dalam gedung Bappeda yang berbagi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. Berikut ini lokasi gedung Bappeda Kabupaten Bekasi.



Gambar 2.3 Lokasi Gedung Bappeda Kabupaten Bekasi

Secara umum kondisi Asset, sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.5 Aset, Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bekasi

NO	ASET YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
A	TANAH		
	Sebidang Tanah		Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
B	PERALATAN DAN MESIN		
	Alat Angkut Roda 4 (Empat)	16 Unit	
	Alat Angkut Roda 2 (Dua)	8 Unit	
	Alat Kantor Rumah Tangga		
	AC	36 Unit	
	Kursi putar, dll	261 Unit	
	Lemari (Besi,Buku, Kayu, Loker,kaca)	93 Unit	
	Lukisan,jam dinding,bingkai Hiasan	13 Unit	
	Dispenser	5 Unit	
	Filling Cabinet	23 Unit	
	Meja(Tamu, Komputer, Kerja, Bundar, Rapat)	113 Unit	
	Rak arsip	30 Unit	
	Rak server	1 Unit	
	Server	1 Unit	
	TV LCD/Smart tv	4 Unit	
	CCTV dan mesin	1 Unit	
	Layar infocus	7 Unit	
	Drone	1 Unit	
	Kulkas	1 Unit	
	Laci	12 Unit	
	Papan struktur	1 Unit	
	Peta	8 Unit	
	Alat Komunikasi		
	Komputer, laptop printer mesin tik, papersreder,proyektor	117 Unit	
	Speaker	4 Unit	
	Mic	15 Unit	
	Mixer	1 Unit	
C	GEDUNG DAN BANGUNAN	C	
	Gedung Kantor Bappeda	1 Unit	
D	ASET TETAP LAINNYA		
	Buku	Eksemplar	

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Tahun 2025



2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi

Kinerja pelayanan perangkat daerah adalah pengukuran terhadap sejauh mana perangkat daerah berhasil mencapai tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan, baik dalam hal efektivitas, efisiensi, maupun kualitas layanan.

Kinerja pelayanan utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET IKU	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					CAPAIAN TAHUN KE-				
				I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah	100	%	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A
2	Indeks Perencanaan	91,67	Poin	N/A	N/A	N/A	84,17	86,67	N/A	N/A	N/A	87,15	88,6	N/A	N/A	N/A	103,50%	102,20%
3	Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80	Poin	N/A	N/A	N/A	65	70	N/A	N/A	N/A	90,79	91,69	N/A	N/A	N/A	139,67%	130,98%

Sumber: Bappeda Kab. Bekasi Tahun 2025



Strategi/ faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi antara lain :

1. Mensinergikan perencanaan mulai dari perencanaan desa, propinsi dan pusat dengan perencanaan daerah;
2. Pemetaan indikator sasaran kepala daerah dengan perangkat daerah;
3. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian target sasaran daerah dan perangkat daerah;
5. Meningkatkan kapasitas SDM Perencana.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan				
	ke-					Anggaran Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.779.476.131	29.937.774.942	28.088.403.781	28.033.659.781	29.762.474.226	11.222.099.156	25.554.542.551	26.810.879.786	26.183.580.735	26.244.317.484	95,27	85,36	95,45	93,41	88,18

Sumber : LKIP Bappeda Kab. Bekasi 2020-2024

Berdasarkan tabel 2.7 Bahwa selama periode 2020–2024, anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi mengalami tren peningkatan secara umum. Anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp29,93 miliar, sedangkan anggaran terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp11,77 miliar. Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun mencerminkan adanya penambahan kebutuhan pembiayaan untuk mendukung program perencanaan dan pengembangan daerah.

Realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bekasi menunjukkan kondisi fiskal yang optimal. Mulai tahun 2020, kinerja serapan membaik secara signifikan, dengan capaian tertinggi pada periode ini terjadi di tahun 2022 sebesar 95,45% dari anggaran. Tahun berikutnya. Namun, capaian serapan anggaran mengalami penurunan yakni 93,41% pada tahun 2023 dan 88,18% pada tahun 2024.

2.4. Mitra Dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan kewenangannya Bappeda tidak dapat secara mandiri melaksanakan pelayanan terutama yang bersifat teknis. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan, Bappeda Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan mitra baik



internal maupun eksternal. Mitra internal terdiri dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan.

Sedangkan Mitra kerja eksternal Bappeda Kabupaten Bekasi dari swasta/perusahaan yang berkontribusi dalam pemberian pelayanan terutama berasal dari perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Bekasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Bekasi selama kurun waktu 2020 – 2024 dapat mengoptimalkan program pembangunan yang ada sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Untuk itu, perlu dioptimalkan koordinasi dengan pelaku usaha untuk dapat melaksanakan TJSLP secara berkelanjutan.

Selain itu Bappeda Kabupaten Bekasi bersama mitra strategis menjadi bagian penting dari tim akselerasi pelaksanaan program strategis lintas sektor daerah seperti:

- a) Kabupaten/Kota Sehat (KKS): mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemberdayaan forum KKS bersama perangkat daerah lintas sektor.



- b) Kabupaten Layak Anak (KLA): membangun sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media.
- c) Penanggulangan Kemiskinan Mempercepat pengurangan angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
- d) P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera): meningkatkan kualitas hidup perempuan, peran keluarga, serta kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan berbasis pemberdayaan perempuan.
- e) Pengarusutamaan Gender (PUG): mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
- f) Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) Mengendalikan dan menekan angka kasus HIV/AIDS, TB, dan Malaria melalui program pencegahan, pengobatan, dan pendampingan pasien.
- g) Percepatan Penurunan Stunting: meningkatkan gizi masyarakat, sanitasi, pola asuh, serta layanan kesehatan dasar untuk menurunkan prevalensi stunting.
- h) Kesehatan Reproduksi untuk Penanganan Kematian Ibu dan Bayi: meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, dan anak agar dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
- i) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB): mengembangkan desa/kelurahan sebagai pusat integrasi program pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh.

Salah satu *Outcome* dan *impact* program di atas diantaranya berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi hingga 0,48 persen pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima *reward* berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) senilai 18,13 miliar dan berhasil masuk sebagai 5 besar terbaik kabupaten/kota se-Jawa Barat, atas kinerja serta komitmennya dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Bekasi dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana adalah sebagai berikut :



- a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kabupaten Bekasi menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- b. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.



- d. Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya *Corporate University* (Corpu) Bappeda diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam hal meningkatkan kualitas perencanaan.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Rumusan masalah dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah identifikasi dan perumusan isu-isu strategis atau pokok permasalahan pembangunan yang dihadapi organisasi atau pemerintah daerah dalam periode lima tahun ke depan. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai kondisi aktual dan potensi tantangan, yang kemudian akan dijadikan dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ingin dicapai. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan dinamika kondisi global, nasional, regional, lokal yang berimplikasi terhadap tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bekasi, diuraikan sebagai berikut.

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya Integrasi dan Sinkronisasi antar Program Nasional, Provinsi, Daerah dan Perangkat Daerah	Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasis Satu Data Belum optimalnya integrasi Rencana Aksi dalam penyusunan dokumen perencanaan Belum optimalnya pemetaan permasalahan dan solusi atas permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya keterlibatan masyarakat secara multi sektoral dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Pihak Swasta/ pengusaha, Akademisi, Komunitas, Media)



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan renja, renstra dengan RPJMD
			Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
			Sumber-sumber pendanaan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal untuk Pembangunan
			Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (tercascading) secara individu
			Belum optimalnya pengendalian atas pencapaian sasaran yang menjadi program-program prioritas pembangunan dan Sasaran Daerah
			Perangkat daerah belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan
			Belum adanya standar atau pedoman pengendalian dan evaluasi bagi perencanaan, pelaksanaan dan hasil perencanaan Pembangunan
			Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) pada Program dan Kegiatan belum sampai kepada Evaluasi pencapaian Sasaran
			Monitoring evaluasi terkait kendala pelaksanaan dokumen perencanaan belum dilakukan secara mendalam dan continue kemudian dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

2.6.2 Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

Pada Tahun 2045, Kabupaten Bekasi diharapkan menjadi kabupaten yang memiliki standar tinggi melebihi kabupaten lainnya di Indonesia dan mampu bersaing dengan standar internasional. Standar kualitas tinggi tersebut dapat dilihat dengan adanya infrastruktur yang modern, terintegrasi dan handal serta menjadi contoh pengelolaan kawasan industri manufaktur terbesar yang terintegrasi dengan infrastruktur yang ramah lingkungan dan canggih, kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perekonomian diatas rata – rata provinsi, dan didukung dengan tata kelola pemerintahan yang kredibel, adaptif, inovatif, modern dan cerdas. Visi Kabupaten Bekasi Tahun 2045 yaitu Kabupaten Bekasi yang Maju, Harmonis dan Berkelanjutan memiliki makna sebagai berikut :

KABUPATEN BEKASI YANG MAJU, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN

MAJU	mencerminkan harapan Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang unggul dari berbagai aspek, antara lain sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur dan teknologi yang andal, serta tata kelola pemerintahan.
HARMONIS	mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
BERKELANJUTAN	memiliki makna bahwa pembangunan di Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan dilakukan dengan mempertahankan kualitas hidup penduduk saat ini dan di masa datang secara berkelanjutan. Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola, secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sumber: RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045

Gambar 2.4. Visi Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045

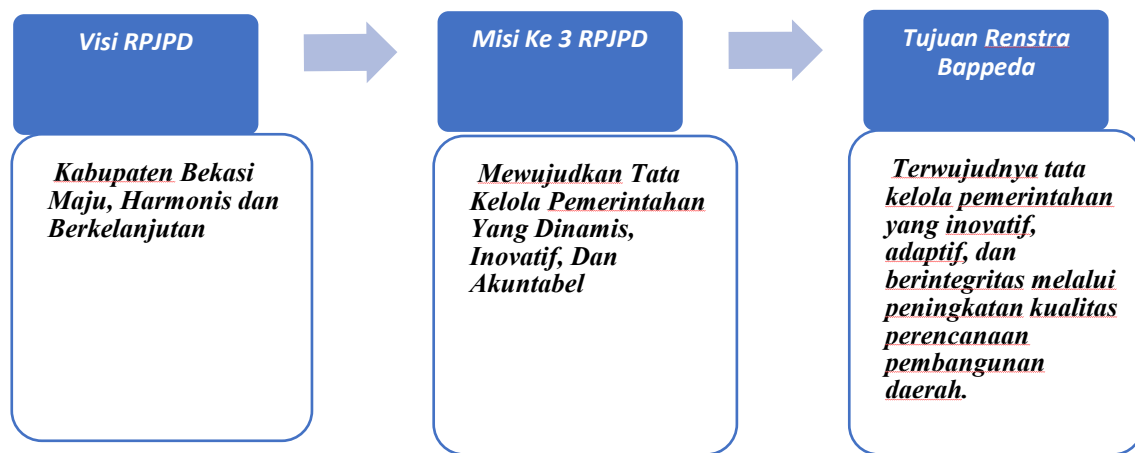
Ketercapaian Visi Kabupaten Bekasi Maju, Harmonis dan Berkelanjutan akan ditunjukkan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

- 1) Peningkatan Pendapatan per kapita
- 2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- 3) Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat
- 4) Peningkatan daya saing sumber daya manusia
- 5) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Keselarasan antara dokumen RPJPD 2025-2045 dengan Renstra Bappeda Bekasi 2025-2029 nampak pada Misi RPJPD Ke 3 yakni *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Inovatif, Dan Akuntabel*, bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dipercaya oleh masyarakat, warga negara, dan pemangku kepentingan lainnya, menjalankan kebijakannya dengan transparan, akuntabel, jujur, berintegritas serta responsif dalam menangani seluruh keluhan masyarakat serta mengembangkan pelayanan publik berbasis inovasi dan modern secara elektronik. Tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis inovasi diharapkan pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kemampuan untuk merespon perubahan – perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi dan teknologi sehingga dengan dinamika atau perubahan – perubahan pada era globalisasi yang semakin cepat menuntut pemerintah dapat merespon tantangan dan memanfaatkan peluang baru, serta menerapkan kebijakan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena pelayanan publik yang

berkualitas berbasis inovasi sangat penting dalam menghadapi dinamika yang kompleks dalam masyarakat modern saat ini.

Misi ini perlu disupport oleh unsur perencanaan yang memiliki fungsi *The Technostructure*, bertugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk standarisasi manajerial perencanaan sebagai awal berjalanya sebuah manajemen dan organisasi yang berkinerja tinggi.



Gambar 2.5. Hubungan RPJPD 2025-2045 dengan Renstra

2.6.3 Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Tema pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola”, merupakan bentuk keselarasan dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan Pembangunan merupakan seluruh upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera melahirkan kerangka pembangunan yang berpijak pada keselarasan kualitas lingkungan dengan kualitas manusia dan kebermanfaatannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bekasi tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi. Pernyataan visi Kabupaten Bekasi periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka



penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur yang Tercantum Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menuju Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera.”

Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Bekasi, ditandai dengan:

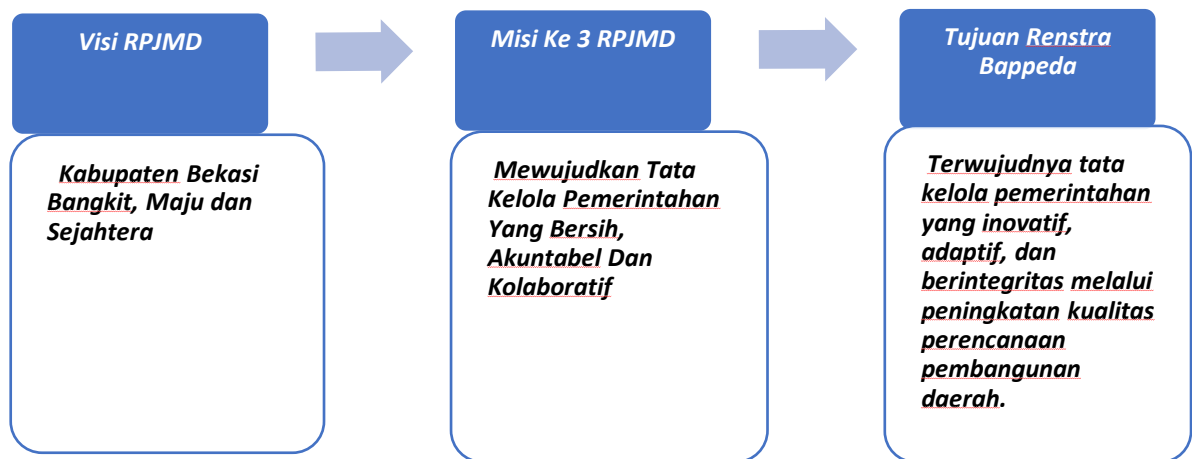
1. Peningkatan Pendapatan per kapita;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
5. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Keterkaitan Renstra Bappeda dengan RPJMD Kab Bekasi Tahun 2025-2029 Terletak pada Misi ke 3 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Kolaboratif**. Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kolaboratif merupakan fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik serta memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Bekasi. Misi ini menjadi landasan strategis dalam membangun aparatur yang profesional, sistem birokrasi yang transparan, serta pelayanan publik yang responsif dan partisipatif.

Sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kabupaten Bekasi dituntut untuk memiliki kapasitas pemerintahan yang tidak hanya mampu mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, integritas aparatur, serta transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi bagian krusial dari arah kebijakan ini.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mempercepat reformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari **perencanaan yang berbasis data**, penganggaran yang berorientasi hasil, hingga penyelenggaraan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, pendekatan kolaboratif akan dikedepankan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas publik serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Melalui penerapan prinsip efisiensi, integritas, dan keterbukaan, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi akan diarahkan tidak hanya untuk menjamin keadilan dalam pelayanan, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah dalam setiap proses pembangunan. Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran, setiap kebijakan publik, dan setiap layanan pemerintah benar benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen kuat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Kabupaten Bekasi siap mewujudkan birokrasi yang melayani, efektif, dan terpercaya, sebagai pilar utama dalam mencapai pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.



Gambar 2.6. Hubungan RPJMD 2025-2029 dengan Rentra

2.6.4 Telaahan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Bappeda Kabupaten Bekasi memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Bappeda memegang peran sentral dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup, efisiensi sumber daya, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi ke dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis tahun 2023, Bappeda Kabupaten Bekasi memiliki 1 indikator TPB yang secara langsung terkait, yaitu:

Tabel 2.9 Hasil Analisis TPB Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	198	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber: Hasil analisis, 2023

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Bekasi telah berhasil melaksanakan indikator TPB 17.18.1(d), yaitu Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target, dengan capaian eksisting sebanyak 198 indikator. Capaian ini menunjukkan bahwa Bappeda:

- Telah mengintegrasikan data indikator SDGs secara cukup luas dan relevan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Telah memenuhi bahkan melampaui target nasional sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017 yang menekankan peningkatan ketersediaan data SDGs.
- Tidak terdapat gap capaian, karena pelaksanaan indikator ini sudah berjalan dan sesuai dengan standar nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan Bappeda dalam menjamin ketersediaan dan keterpilahan data indikator SDGs untuk mendukung proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip-prinsip KLHS, keberhasilan pencapaian indikator 17.18.1(d) menunjukkan bahwa:

- Aspek Lingkungan: Tersedianya data terpilih SDGs mendukung perencanaan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk potensi dan risiko ekologis di Kabupaten Bekasi.
- Aspek Sosial: Data terpilih memungkinkan analisis yang lebih akurat terkait kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, masyarakat miskin), sehingga dapat memengaruhi arah kebijakan yang inklusif.
- Aspek Ekonomi: Perencanaan pembangunan berbasis data mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi investasi pembangunan, serta memperkuat sinergi antara sektor ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- Aspek Tata Kelola: Pengelolaan data SDGs yang terpadu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti.

Dengan demikian, capaian ini mencerminkan bahwa tata kelola perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi telah mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan,



terutama dalam aspek ketersediaan dan keterpilahan data pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti.

Bappeda Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan utama dalam membangun perencanaan pembangunan yang sinergis, terarah, dan berbasis kinerja. Perencanaan masih belum sepenuhnya mencerminkan koordinasi lintas sektor, pendekatan strategis, dan integrasi dengan pendanaan. Selain itu, fungsi monitoring dan evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, dirumuskan sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Isu-isu ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang dapat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah

2.6.5 Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional, Regional dan Lokal

2.6.5.1 Isu Global

Isu global menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dinamika yang berkembang secara global perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Adapun beberapa isu global yang sedang berkembang saat ini antara lain :

a) Geopolitik dan Geoekonomi

Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan–Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.



b) Disrupsi Teknologi

Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi yang berpotensi tumpang tindih, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

c) Perubahan Iklim

Tantangan Pemanasan Global akibat Perubahan Iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi pada periode 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate 2022* menyebutkan bahwa Tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi satu isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

d) Demografi Global

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.



e) Urbanisasi Internasional

Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

f) Hasil Pertemuan G20 Indonesia

KTT G20 Bali berlangsung pada 15-16 November 2022 di kawasan Nusa Dua, Bali. Para pemimpin dari negara anggota G20, sejumlah lembaga internasional, dan negara-negara undangan berkumpul untuk membahas sejumlah isu krusial di tingkat global. Pertemuan itu pun berakhir dengan tercapainya *G20 Bali Leaders' Declaration*, yakni kesepakatan para pemimpin G20 terkait berbagai aspek, mulai dari ekonomi, geopolitik, ketersediaan pangan, dan lain-lain. Leaders' Declaration itu berisi 52 paragraf, yang merupakan rangkuman dari 24 dokumen komunike, rekomendasi, serta masukan hasil pembahasan kelompok kerja dan pertemuan tingkat menteri. Secara keseluruhan, terdapat 437 pertemuan di berbagai tingkat sebelum tercapainya kesepakatan saat KTT G20.

Di dalam *G20 Bali Leaders' Declaration* atau Deklarasi Bali 2022, tercantum 52 paragraf sebagai hasil KTT G20 Bali. Poin-poin itu membahas permasalahan mengenai:

1. Ketegangan global;
2. Isu krisis pangan;
3. Perubahan iklim;
4. Kesehatan global;
5. Transformasi digital.

g) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam isu-isu strategis internasional adalah berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke



arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD dan Renstra.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;



9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.6.5.2 Isu Nasional

Isu nasional juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dinamika yang berkembang saat ini di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Adapun beberapa isu nasional yang sedang berkembang saat ini antara lain:

a) Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi Covid-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.



Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi: (i) Peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) Transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) Pengembangan *smart grid* termasuk jaringan interkoneksi dalam (*island grid*) dan antar pulau (*national grid*) serta sistem terisolasi (*isolated grid*); (iv) Pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (v) Pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) Penerapan ekonomi sirkular; (vii) Pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) Perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan *green financing* dan (iv) Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan Kabupaten Bekasi tidak mempunyai lingkungan perairan kelautan, maka indikator ekonomi biru belum bisa diterapkan.

Khusus mengenai penerapan Ekonomi Sirkular di Kabupaten Bekasi, pendekatan Ekonomi Sirkular memberikan dasar etika dan arahan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi yang relevan dan unggulan dengan mengacu pada indikator yang jelas. Hadirnya keterhubungan antarpelaku produksi-konsumsi menjadi pangkal dari perumusan pendekatan ekonomi sirkular. Berdasarkan proposisi tersebut, maka pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat dilakukan dengan menyasar isu-isu spesifik kedaerahan dalam konteks pengembangan sektor ekonomi unggulan seperti sektor kelautan dan pariwisata.

b) Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan, serta masih rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi



tantangan nasional. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu terendah di Asia.

c) Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta ketahanan bencana

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun pertahunnya, adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rerata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air,



dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun selama periode Tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co₂ atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCO₂e GrCO₂e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022*). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah.

d) Bonus demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan.

Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Penduduk usia produktif yang dominan



menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia.

Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

e) Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lingkungan dan isu transformasi pelayanan publik ini mencakup profesionalitas ASN, pelayanan publik, kelembagaan, dan akuntabilitas.

2.6.5.3 Isu Regional (Provinsi Jawa Barat)

a) Fokus 1 : Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

1. Layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera isu mencakup akses layanan kesehatan bersama, tuntas wajib belajar sampai dengan SMA, stunting, pemenuhan layanan pendidikan masyarakat, layanan kesehatan dan kemiskinan bersama, pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas (kesehatan, pendidikan), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung bonus demografi.

2. Perlindungan sosial terintegrasi masyarakat miskin

Kedalam isu ini mencakup kemiskinan dan rumah tidak layak huni, Penanganan kemiskinan melalui ekonomi keluarga, Sistem informasi PPKS, Perlindungan masyarakat miskin secara tepat sasaran, Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, Layanan kesehatan dan kemiskinan bersama wilayah perbatasan, Pemberdayaan masyarakat miskin petani dan nelayan, layanan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan, serta skenario mitigasi bertambahnya penduduk miskin.

3. Pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah

Isu ini mencakup Pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal, Pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal, Ketimpangan akses sosial dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif,



Kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerataan kualitas hidup berbasis teknologi, dan skenario mitigasi melebarnya tingkat ketimpangan.

4. Penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja

Kedalam isu ini mencakup Ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja, Industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal, Ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja, Optimalisasi kuantitas dan kualitas BLK, Pencetakan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing, Ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja, digital skill kepada tenaga kerja pemuda, Kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, SDM tenaga kerja yang kompeten, dan Perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan.

5. Kesejahteraan Petani

Isu ini mencakup Konflik antar nelayan dalam pemanfaatan ruang laut, Pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap bersama pada batas wilayah laut 12 mil, Produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian, Regenerasi petani, Produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut, dan Pemanfaatan bersama pelabuhan perikanan.

6. Sistem Pangan yang Berkelanjutan

Isu ini meliputi Produktivitas pertanian dan perikanan, Adaptasi varietas pertanian berketahanan iklim, Sistem pangan berkelanjutan, Kelancaran distribusi ternak wilayah perbatasan, Belum optimalnya penerapan pola konsumsi pangan yang berkelanjutan, Pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan, Produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut, Produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian, Regenerasi petani, Ketersediaan pangan berkelanjutan, Ketersediaan dan akses pangan, serta Optimalisasi logistik *global value chain* dan *blue economy*.

b) Fokus 2 : Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

1. Infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana

Isu ini di dalamnya meliputi aglomerasi perkotaan di Bodebekpunjur, Rebana, dan Cekungan Bandung sebagai *engine of growth*, Infrastruktur persampahan berkelanjutan dan sistem transportasi yang efisien, Penyediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air, air bersih, limbah, jalan, sampah yang merata, Penyediaan dan layanan sistem



transportasi, konektivitas antar pusat kegiatan, persampahan serta rantai pasok pangan yang efisien, Infrastruktur berkelas dunia, Keselamatan pelayaran ASDP lintas provinsi (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), Infrastruktur wilayah dan logistik terintegrasi (kereta, sistem logistik pelabuhan dan bandara, air bersih, transportasi darat), Infrastruktur perbatasan terintegrasi, handal dan adaptif bencana (jalan, sampah, air bersih, pelabuhan kereta, air limbah serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung perekonomian. Berdasarkan isu-isu tersebut, didapatkan satu isu besar yaitu infrastruktur.

2. Infrastruktur digital yang merata dan berkualitas

Isu ini mencakup pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam ekonomi digital, Kesiapan transformasi digital yang berkelanjutan, keterjangkauan akses digital yang merata, dan penggunaan teknologi digital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan

Isu ini mencakup Pengembangan EBT untuk mendukung *green economy* dan transisi energi, Infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat Isu ini mencakup Penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, Penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, Ketersediaan air baku dan air bersih yang berkualitas dan kontinyu, Penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan.

c) Fokus 3 : Peningkatan Produktivitas Daerah

1. Produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian

Isu ini mencakup Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan, Optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi, pengembangan IKM dan UKM, optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata, dan ekraf peningkatan investasi dan promosi investasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja industri, pengembangan pariwisata kelas dunia, Kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas, Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas, *Link and match* antara industri dan sektor hulu, serta mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.



2. UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat

Isu ini mencakup Peran pemuda dalam kewirausahaan, Peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi Optimalisasi pertumbuhan startup, Pemberdayaan UMKM dan Startup, Penguatan IKM dan UMKM, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri), Pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM, Integrasi pengembangan Ekraf, dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi wilayah perbatasan, Kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM, serta Komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

d) Fokus 4 : Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan

1. Pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya

Isu ini didalamnya mencakup Pendidikan usia dini berbasis lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan pada usia dini (0-5 tahun), Pemajuan kebudayaan, Pengelolaan SDM yang terintegrasi (publik, swasta, dan masyarakat), Penguatan kurikulum adaptif berbasis TIK, Pengembangan dan Penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Pelestarian masyarakat adat dan cagar budaya, optimalisasi kompetensi tenaga kerja, pendidikan vokasi, keselarasan subsidi pendidikan, Akses pendidikan lintas batas wilayah perbatasan, pemajuan kebudayaan daerah, dan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

2. Kesetaraan Entitas Sosial dan Individu dalam Pembangunan

Isu ini di dalamnya meliputi Pemberdayaan masyarakat yang inklusif, Pembangunan yang merata dan inklusif, Inklusivitas dalam pembangunan bagi semua kalangan.

3. Ketersediaan Infrastruktur Digital

Dalam isu ini termasuk di dalamnya tentang Peningkatan fasilitas Pendukung transformasi digital, peningkatan kemampuan SDM digital (*Digital Skill*), akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi melalui peningkatan literasi digital, transformasi digital, dan *digital divide*/kesenjangan untuk mengakses teknologi digital.



e) Fokus 5 : Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

1. Pembangunan Keluarga yang Berkualitas

Isu ini mencakup sistem informasi PPKS, Jabar sebagai provinsi yang memperhatikan lansia, meminimalisir gangster, dan awareness terhadap kesehatan mental.

2. Pemajuan Kebudayaan

Isu ini mencakup aspek regulasi muatan lokal kebudayaan daerah, platform kebudayaan, serta penanaman nilai agama dan budaya bangsa.

f) Fokus 6 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan Ke dalam isu ini termasuk di dalamnya penanganan kualitas lingkungan terintegrasi, alih fungsi lahan, peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, kerusakan pesisir pantai, pengelolaan sampah, Banjir Rob Pantai Utara akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, ekonomi berkelanjutan berbasis industri hijau, pemenuhan kawasan lindung, pengelolaan limbah, Ruang Terbuka Hijau dan Imbal Jasa Ekologis, pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan, ekonomi hijau berbasis digital, dan Dampak pengembangan industri manufaktur terhadap lingkungan.

2. Mitigasi Risiko Bencana Berbasis Masyarakat

Ke dalam isu ini termasuk di dalamnya mitigasi tsunami pada zona megathrust pantai selatan, penanganan bencana yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat, mitigasi bencana dan perubahan iklim, timbulnya abrasi di pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang, dan perlindungan sosial adaptif.

g) Fokus 7 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Tata kelola pemerintahan kolaboratif

Ke dalam isu ini termasuk di dalamnya kelembagaan kerjasama antar daerah, struktur organisasi yang efektif, kolaborasi pentahelix dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan yang inklusif, environmental Leadership, dan perbaikan regulasi dalam semua aspek birokrasi.

2. Pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik

Ke dalam isu ini termasuk didalamnya Pelayanan adaptif dan terintegrasi pada kawasan greater metro, pemanfaatan citra digital dalam pendataan kendaraan bermotor, optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam



pelayanan publik, Digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dan kemudahan izin berusaha dan investasi.

3. Sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan

Ke dalam isu ini termasuk didalamnya kawasan perbatasan yang berdaya saing, Penyiapan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien, Transformasi digital, Pencarian alternatif sumber pendanaan yang lain belum optimal, Pemimpin 4.0 yang adaptif dan responsif. Pembangunan inklusif yang berkelanjutan, Pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan inovasi (*AI, Metaverse*, dll) dalam pembangunan berkelanjutan, dan Peningkatan partisipasi pada forum-forum inovasi IPTEK dan sains.

2.6.5.4 Isu Strategis Kabupaten Bekasi

Terdapat 5 (lima) Isu pokok di lingkungan Kabupaten Bekasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yakni:

- 1) Perekonomian inklusif yang berdaya saing, tangguh, yang berbasis sektor unggulan daerah;
- 2) Pembangunan yang berketahanan dan berkelanjutan, berbasis tata ruang serta daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- 3) Pemenuhan Pelayanan Dasar, Dan Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata, Dan Berkeadilan;
- 4) Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berbudaya maju dan berdaya saing;
- 5) Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan publik yang inovatif

Namun yang paling relevan dengan tugas, kewenangan dan tantangan Bappeda adalah isu "*Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif*". Isu ini merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun pondasi Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan publik yg inovatif yang harus di perhatikan di Kabupaten Bekasi yaitu antara lain :

- 1) Peningkatan Pelayanan SPBE;
- 2) Integrasi aplikasi pemerintah daerah;
- 3) Pengoptimalan pelaksanaan *Smart City*;
- 4) Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik yang responsif melalui transformasi digital;

- 5) Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- 6) Penguatan sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- 7) Penataan Kelembagaan dan regulasi penelitian serta inovasi daerah;
- 8) Penguatan perencanaan kolaboratif, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengawasan internal;
- 9) Optimalisasi kerjasama daerah Penataan Aset Daerah;
- 10) Optimalisasi potensi objek pendapatan asli daerah;
- 11) Peningkatan Kualitas Digitalisasi Arsip Daerah;
- 12) Penguatan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.6.6 Penentuan Isu-isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan dari pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi yang telah dibahas pada tabel di atas (Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Bekasi), serta ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi
- Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
- Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Telaahan Terhadap Isu-isu Global, Nasional, Regional dan Lokal.



Gambar 2.7 Alur Penetapan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi

Maka dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Bekasi sesuai tabel berikut :



Tabel 2.10 Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi

Potensi Daerah	Permasalahan BAPPEDA	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan Dengan BAPPEDA	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan BAPPEDA				Isu Strategis Renstra BAPPEDA	
			Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten Bekasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Didominasi oleh penduduk usia produktif	Belum optimalnya Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Perlunya upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang berkebudayaan secara inklusif dan merata	Distrupsi teknologi	Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kualitas data dan informasi pembangunan masih terbatas	
							Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi program	
	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Geopolitik dan geoekonomi	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Percepatan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berbudaya Maju dan Berdaya Saing	Keterbatasan pendanaan pembangunan daerah	
							Konektivitas dan Infrastruktur Dasar	Rendahnya integrasi antar sektor dan wilayah
								Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Sumber: Bappeda Kab. Bekasi Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NSPK: Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Sasaran RPJMD: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Berintegritas.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berintegritas melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah total nilai dari seluruh nilai masing-masing indikator dan sub indikator dikalikan bobot indikator dan sub indikator (SE Menteri PPN No. 3 Tahun 2023)</i>	88.60	88.65	88.70	88.75	88.80	88.85	88.90	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan yang lebih operasional.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan memedomani tahapan pembangunan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Tahap Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Bekasi
Periode 2025-2030**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)
Penguatan Sistem dan SDM Perencanaan, Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi Perencanaan Ekonomi Unggulan Daerah	Penguatan Inovasi dan Orkrestasi Perencanaan Ekonomi Daerah Berbasis Data dan Potensi Lokal
Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)
Penguatan Evaluasi Pengendalian, dan Konsolidasi Capaian Pembangunan	Penyiapan instrumen akselerasi pembangunan daerah
Tahap V (2030)	
Pemantapan instrumen akselerasi pembangunan daerah	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi periode 2025-2029 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal. Perlu digarisbawahi bahwa perumusan strategi dan arah kebijakan disusun berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Bekasi.



Dengan kata lain strategi dan arah kebijakan yang terumuskan berkarakteristik *measurable*, terukur dan dapat dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi sesuai kewenangannya. Adapun hasil analisis untuk menentukan strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W):
Internal	a. Memiliki peran strategis sebagai pengendali pembangunan daerah seiring dengan adanya fungsi monitoring dan evaluasi; b. Memiliki kedudukan strategis sebagai kordinator perencanaan seluruh perangkat daerah sehingga berpotensi menjadi unsur Think Tank Pemerintah Daerah; c. Memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan.	a. Arsitektur kinerja/ penjenjangan belum mampu menggambarkan keselarasan dan sinergitas kinerja pembangunan lintas instansi; b. Belum optimalnya penerapan konsep SMART dan THIS dalam perencanaan; Pembangunan c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data capaian kinerja dalam evaluasi; d. Hasil monitoring dan evaluasi belum ditindaklanjuti dalam penyesuaian strategi dan kebijakan pencapaian kinerja; e. Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan belum dilaksanakan secara berjenjang; f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi yang terintegrasi.
	Peluang (O) :	Tantangan (T):
Eksternal	a. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjamin akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah; b. Terbitnya pedoman mengenai penjenjangan kinerja menjadi guide line dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.	a. Belum optimalnya Integrasi perencanaan Pendanaan Pembangunan b. Belum optimalnya partisipasi dan keterlibatan stakeholder dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan c. Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM perencana di perangkat daerah maupun di Bappeda d. Kurang konsistennya PD dalam <u>penginputan data</u>

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

3.2.1 Strategi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka Bappeda Kabupaten Bekasi menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif;
2. Meningkatkan Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi SDM perencana melalui pelatihan teknis, tematik, adaptif;
2. Mendorong pemerataan kualitas dan kuantitas SDM perencana;
3. Optimalisasi implementasi SIPD dan integrasi sistem informasi daerah
4. Penguatan peran koordinator forum data dalam pengelolaan Satu Data Daerah
5. Pemanfaatan *big data analytics* untuk *data-driven planning*
6. Penerapan prinsip THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)
7. Penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan kawasan strategis
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum dan kanal digital
9. Penyusunan indikator kinerja yang SMART dan relevan
10. Kolaborasi pentahelix dalam proses perencanaan
11. Sinkronisasi indikator antar dokumen perencanaan dan implementasi
12. Penyempurnaan sistem pengendalian monitoring dan evaluasi yang terstruktur
13. Integrasi hasil evaluasi ke dalam kebijakan
14. Penyesuaian terhadap dinamika regulasi
15. Penyusunan regulasi tentang penguatan pengendalian perencanaan Pembangunan
16. Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Bekasi secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BAPPEDA
1	2	3	4	5
1	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana Pembangunan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif	Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.	Meningkatkan kompetensi SDM perencana melalui pelatihan teknis, tematik, adaptif
				Mendorong pemerataan kualitas dan kuantitas SDM perencana
2	Penguatan Sistem Perencanaan Berbasis Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi			Optimalisasi implementasi SIPD dan integrasi sistem informasi daerah
				Penguatan peran koordinator forum data dalam pengelolaan Satu Data Daerah



No	Operasionalisasi NSPK	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BAPPEDA
1	2	3	4	5
				Pemanfaatan <i>big data analytics</i> untuk <i>data-driven planning</i>
				Optimalisasi inovasi perencanaan pembangunan daerah
3	Peningkatan Sinergitas Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah			Penerapan prinsip THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)
				Penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan kawasan strategis
4	Reformulasi Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah			Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum dan kanal digital
				Penyusunan indikator kinerja yang SMART dan relevan
5	Penguatan Kemitraan Pembangunan yang Inklusif			Kolaborasi pentahelix dalam proses perencanaan
				Sinkronisasi indikator antar dokumen perencanaan dan implementasi
6	Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah		Penyempurnaan sistem pengendalian monitoring dan evaluasi yang terstruktur
				Integrasi hasil evaluasi ke dalam kebijakan
				Penyesuaian terhadap dinamika regulasi
				Penyusunan regulasi tentang penguatan pengendalian perencanaan Pembangunan

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

3.3. Pohon Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan integrasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan struktur Pohon Kinerja yang menjadi kerangka logis hubungan antara mandat, tujuan, sasaran, hingga kinerja operasional yang relevan. Penyusunan pohon kinerja ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh rumusan strategi pembangunan wilayah selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bekasi serta

mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah secara terukur dan sistematis.

Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja instansi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan *outcome*/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Untuk mengidentifikasi *outcome* dilakukan berdasarkan bukti (*evidence*) atau data yang andal dan valid. Identifikasi *outcome* juga harus terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi.

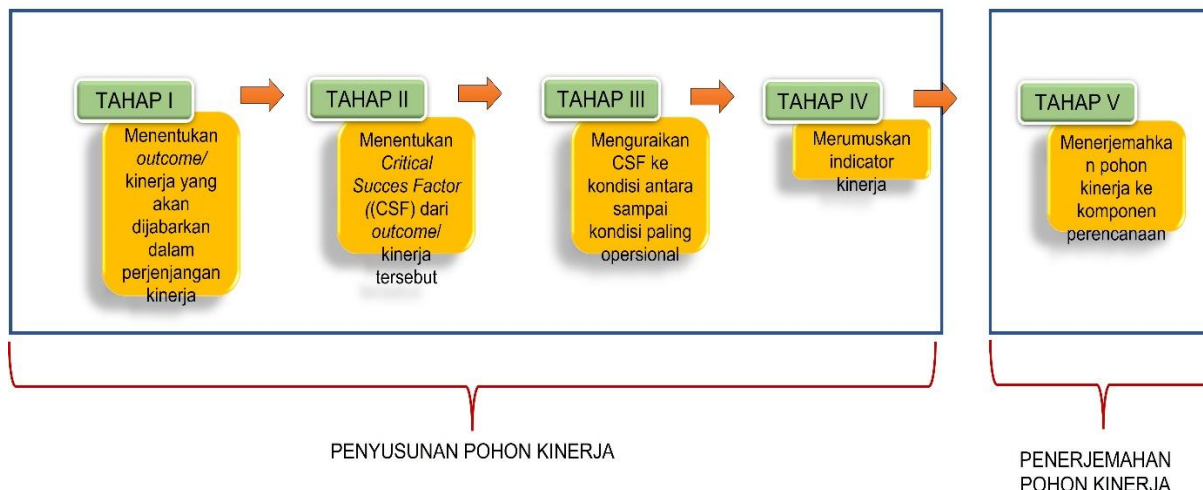
Tahap kedua setelah menetapkan *outcome*/hasil yang harus dicapai, yaitu mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) *outcome*/ hasil terkait CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Untuk menentukah CSF, perlu diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah, kemudian diterjemahkan menjadi kalimat-kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai *outcome*. Proses penjabaran CSF dapat dilakukan dengan menggunakan gambar/diagram.

Tahap ketiga yaitu menguraikan *Critical Success Factor* (CSF) kepada kondisi kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/ideal. CSF yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses penjabarannya sama seperti Ketika mengidentifikasi *key success factor* dan menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian *outcome*.

Tahap keempat yaitu melengkapi setiap variabel dengan indikatornya masing-masing. Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan terukur, Indikator yang baik yaitu indikator yang memenuhi kriteria SMART, yakni *Specific*, *Measurable*, *Attainable*, *Relevant*, dan *Timebound*.

Secara detail tahapan penyusunan pohon kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029



Adapun perumusan rinci pohon kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan 3 (tiga) level matriks. Level I (satu) menyajikan kerangka awal berupa tujuan Renstra yang dirumuskan dari isu-isu strategis prioritas. Tujuan ini menjadi arah besar yang hendak dicapai Bappeda Kabupaten Bekasi dalam periode perencanaan, dengan harapan terwujudnya layanan publik yang inklusif, pemerintahan yang efektif, serta kewenangan daerah yang berdampak nyata.

Level 2 (dua) menguraikan turunan dari tujuan Renstra tersebut ke dalam sasaran strategis dengan pendekatan *Critical Success Factor* (CSF). Di sini dijabarkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode Renstra, strategi yang ditempuh, serta outcome menengah yang menjadi penghubung antara tujuan makro dan hasil pembangunan nyata.

Level 3 (tiga) mengidentifikasi program perangkat daerah dan program pendukung lain yang relevan. Tabel ini menghubungkan sasaran strategis dengan program konkrit yang dilaksanakan lintas perangkat daerah, sehingga memastikan integrasi dan sinergi dalam implementasi pembangunan daerah. Dengan demikian, ketiga tabel ini membentuk alur yang sistematis, mulai dari perumusan tujuan, penjabaran sasaran, hingga penyusunan program yang aplikatif.

Adapun rincian rincian penyusunan pohon kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.5 Merumuskan Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 berdasarkan Isu Strategis (Level I)

MANDAT (DASAR HUKUM):	(MUATAN TEKNOKRATIS) ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	(<i>ULTIMATE OUTCOME</i>) TUJUAN RENSTRA
1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024; 4. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025; 8. Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Bekasi Tahun 2011-2031; 9. Perda Kab. Bekasi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 10. Perda Kab. Bekasi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Mengah Daerah Tahun 2025-2029	1. Kualitas data dan informasi pembangunan masih terbatas 2. Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi program 3. Keterbatasan pendanaan pembangunan daerah 4. Rendahnya integrasi antar sektor dan wilayah 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berintegritas melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
HARAPAN: Perencanaan pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kab. Bekasi		

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.6 Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 (Level II)

(<i>ULTIMATE OUTCOME</i>) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(<i>CRITICAL SUCCESS FACTOR</i>) STRATEGI	(<i>INTERMEDIATE OUTCOME</i>) SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berintegritas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana pembangunan 2) Penguatan sistem perencanaan berbasis data	Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah



(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS
melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		dan pemanfaatan teknologi informasi 3) Peningkatan sinergitas perencanaan lintas sektor dan wilayah 4) Reformulasi arsitektur kinerja pembangunan daerah 5) Penguatan kemitraan pembangunan yang inklusif	
		Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025



Tabel 3.7 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 (Level III)

(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana pembangunan 2) Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan pemanfaatan teknologi informasi 3) Peningkatan sinergitas perencanaan lintas sektor dan wilayah 4) Reformulasi arsitektur kinerja pembangunan daerah 5) Penguatan kemitraan pembangunan yang inklusif	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2) Program Riset dan Inovasi 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Program pendapatan daerah 5) Program pengembangan kompetensi ASN
Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Administrasi	1) Meningkatkan Presentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2) Meningkatkan Presentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 3) Meningkatkan Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1) Program Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2) Program penyelenggaraan pengawasan 3) Program reformasi birokrasi 4) Program akuntabilitas pemerintahan

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025



Untuk melengkapi seluruh proses penjenjangan kinerja di atas maka diruaikan penjabaran dan penyelarasan sasaran, indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah di Bappeda Kabupaten Bekasi, sehingga kinerja individu dan unit kerja selaras dengan visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Cascading Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

[illegible]



BAPPEDA
KABUPATEN BEKASI



BAPPEDA



BAPPEDA
KABUPATEN OKLAHOMA



BAPPEDA



BAPPEDA



KEPALA SKPD										SEKRETARIS/ KEPALA BIDANG						Ketua Tim/ SUBBAGIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO.	SASARAN KINERJA KEPALA SKPD	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET TAHUN SEBELUMNYA	TARGET						SEKRETARIAT/ BIDANG	SASARAN KINERJA PROGRAM / SASARAN SEKRETAR I S/ KABID	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR SASARAN SEKRETARIS / KABID	RUMUS	TARGET PROGRAM						JUDUL PROGRAM	SASARAN KINERJA KEGIATAN/ SASARAN Ketua Tim	INDIKATOR HASIL KEGIATAN/ INDIKATOR Ketua Tim	RUMUS	TARGET					JUDUL KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN					SASARAN KINERJA SUBKEGIATAN	JUDUL SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN					Ketua Tim/ Subbagian																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					2026	2027	2028	2029	2030	2026					2027	2028	2029	2030	2026			2027	2028	2029	2030	2026				2027	2028	2029	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

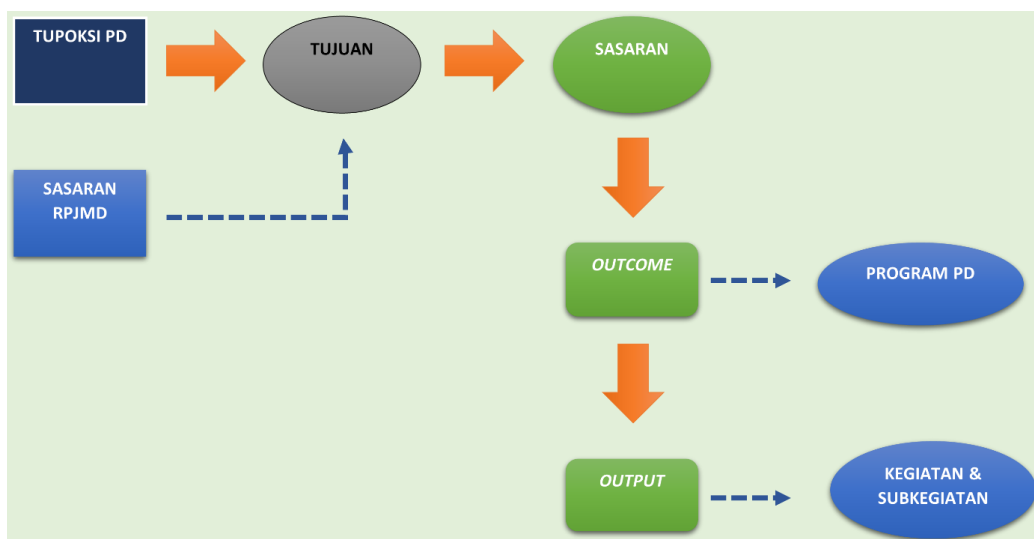
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra



Sumber : diolah dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025



Pemetaan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang harus digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan pencapaian sasaran telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini telah ditetapkan pula kinerja yang dihasilkan, indikator keluaran dan satuan hasil dari tiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran nya, Bappeda menggunakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) subkegiatan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2025-2029**

URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01				PERENCANAAN
5	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
5	01	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	01	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	01	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	01	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	01	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	01	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5	01	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	01	1	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	01	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	01	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	01	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5	01	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	01	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	01	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	01	1	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	01	1	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	01	1	2.06	0009	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	01	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	1	2.07	00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	01	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	01	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	01	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	01	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik



URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	03			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Selanjutnya diuraikan teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	RUMUS	Satuan	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
NSPK: Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Sasaran RPJMD: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Berintegritas.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berintegritas melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.				Indeks Reformasi Birokrasi (General)		Poin					
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		Poin					
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	(Jumlah Program RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD) dikali 100%	Persen	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	(Jumlah Program Renstra PD dibagi Jumlah Program RPJMD) dikali 100%	Persen					
			Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		Persentase submodul informasi pembangunan daerah dalam SIPD yang diinput dan diselesaikan sesuai tahapan	(Jumlah submodul yang telah selesai dikelola / Total submodul yang wajib dikelola) dikali 100%	Persen					
				Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)		Dokumen	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		Berita Acara	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Berita Acara	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Berita Acara	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		Usulan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		Dokumen	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah			Laporan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Laporan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	RUMUS	Satuan	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Laporan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Dokumen	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Dokumen	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Orang	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		Buku	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	RUMUS	Satuan	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
					Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	RUMUS	Satuan	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		Laporan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi PD		Poin	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan			Dokumen	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	RUMUS	Satuan	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah			Dokumen	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan			Layanan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	RUMUS	Satuan	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
									DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun			unit	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan			Layanan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun			unit	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi		Unit	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
		Keluaran		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05.01	PERENCANAAN				#####		#####		#####		#####		#####	-
05.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	
		Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	#####	5 dokumen	#####	5 dokumen	#####	6 dokumen	#####	5 dokumen	#####	
5.01.02.2.01. 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	-	-		-		-	1 dokumen	#####		-	
5.01.02.2.01. 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	berita aca	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	
5.01.02.2.01. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	berita aca	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	
5.01.02.2.01. 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita aca	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	1 berita acara	#####	
5.01.02.2.01. 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	187 usulan	187 usulan	#####	187 usulan	#####	187 usulan	#####	187 usulan	#####	187 usulan	#####	
5.01.02.2.01. 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	2 dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan	#####	3 dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan dan Revisi RPJMD	#####	2 dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan	#####	3 dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan dan Teknokratik RPJMD	#####	3 dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan dan RPJMD	#####	

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
		Keluaran		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	#####	3 dokumen	#####	3 dokumen	#####	3 dokumen	#####	3 dokumen	#####	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 dokumen	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	105 orang	130 orang	#####	130 orang	#####	130 orang	#####	130 orang	#####	130 orang	#####	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	1 buku	#####	1 buku	#####	1 buku	#####	1 buku	#####	1 buku	#####	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	2 laporan	2 laporan	#####	2 laporan	#####	2 laporan	#####	2 laporan	#####	2 laporan	#####	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	3 laporan	#####	3 laporan	#####	3 laporan	#####	3 laporan	#####	3 laporan	#####	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	4 laporan	#####	4 laporan	#####	4 laporan	#####	4 laporan	#####	4 laporan	#####	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
		Keluaran		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	
5.01.03.2.01. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 dokumen	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	5 dokumen 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang Pemerintahan 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	5 dokumen 1. Laporan Teknokratik RPJMD Bidang Pemerintahan 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	5 dokumen 1. Laporan Rancangan RPJMD Bidang Pemerintahan 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	
5.01.03.2.01. 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	
5.01.03.2.01. 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	15 Laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Pemerintahan)	#####	
5.01.03.2.01. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 laporan	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	
5.01.03.2.01. 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 laporan	8 dokumen (Bidang Kesmas dan Pemb. Manusia) 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	10 dokumen (5 output utk masing2 Bidang Kesmas dan Pemb. Manusia) 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang Kesmas dan PM 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	8 dokumen (Bidang Kesmas dan Pemb. Manusia) 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	10 dokumen (5 output utk masing2 Bidang Kesmas dan Pemb. Manusia) 1. Laporan Teknokratik RPJMD Bidang Kesmas dan PM 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	10 dokumen (5 output utk masing2 Bidang Kesmas dan Pemb. Manusia) 1. Laporan Rancangan RPJMD Bidang Kesmas dan PM 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	
5.01.03.2.01. 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 laporan	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
		Keluaran		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 laporan	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	8 laporan (Jumlah PD Mitra Bidang Kesmas dan PM)	#####	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 laporan	4 Laporan (utk bidang kesmas dan PM) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	4 Laporan (utk bidang kesmas dan PM) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	4 Laporan (utk bidang kesmas dan PM) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	4 Laporan (utk bidang kesmas dan PM) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	4 Laporan (utk bidang kesmas dan PM) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 dokumen	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	8 dokumen (Bidang Perekonomian dan Pemb. Ekraf) 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	10 dokumen (5 output utk masing2 Bidang Perekonomian dan Pemb. Ekraf) 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang Perekonomian dan Ekraf 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	#####	8 dokumen (Bidang Perekonomian dan Pemb. Ekraf) 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	10 dokumen (5 output utk masing2 Bidang Perekonomian dan Pemb. Ekraf) 1. Laporan Teknokratik RPJMD Bidang Perekonomian dan Ekraf 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	#####	10 dokumen (5 output utk masing2 Bidang Perekonomian dan Pemb. Ekraf) 1. Laporan Rancangan RPJMD Bidang Perekonomian dan Ekraf 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	#####	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 laporan	5 laporan (Jumlah PD Bidang Perekonomian dan Ekraf)	#####	7 laporan	#####	7 laporan	#####	7 laporan	#####	7 laporan	#####	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 laporan	5 laporan (Jumlah PD Bidang Perekonomian dan Ekraf)	#####	7 laporan	#####	7 laporan	#####	7 laporan	#####	7 laporan	#####	

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
		Keluaran		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 laporan	4 Laporan (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	4 Laporan (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	4 Laporan (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	4 Laporan (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	4 Laporan (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### (2 Laporan utk masing2 bidang perekonomian dan Ekraf) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 dokumen	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	##### 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	##### 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	4 dokumen 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	##### 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	5 dokumen 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	##### 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	5 dokumen 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	##### 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5.Renja Perubahan	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 laporan	4 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 laporan	4 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	3 laporan (Jumlah PD bidang SDA)	##### (Jumlah PD bidang SDA)	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 laporan	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	2 Laporan - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	##### - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 dokumen	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	8 dokumen	#####	

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	12 dokumen (4 Output utk masing2 bidang SDA LH, Keciptakarya kewilayahan dan BinaMarga dan Perhubgn) 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	15 dokumen (5 Output utk masing2 bidang SDA LH, Keciptakarya kewilayahan dan BinaMarga dan Perhubgn) 1. Laporan Rancangan Revisi RPJMD Bidang SDA LH, CKTR dan Kewilayahan, dan Binamarga dan Perhubgn 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	12 dokumen (4 Output utk masing2 bidang SDA LH, Keciptakarya kewilayahan dan BinaMarga dan Perhubgn) 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	15 dokumen (5 Output utk masing2 bidang SDA LH, Keciptakarya kewilayahan dan BinaMarga dan Perhubgn) 1. Laporan teknokratik RPJMD Bidang SDA LH, CKTR dan Kewilayahan, dan Binamarga dan Perhubgn 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	15 dokumen (5 Output utk masing2 bidang SDA LH, Keciptakarya kewilayahan dan BinaMarga dan Perhubgn) 1. Laporan Rancangan RPJMD Bidang SDA LH, CKTR dan Kewilayahan, dan Binamarga dan Perhubgn 2. Rancangan Renja Murni 3. Renja Murni 4. Rancangan Renja Perubahan 5. Renja Perubahan	#####	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	5 Laporan (Jumlah PD Bidang Infracwil)	#####	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	6 Laporan (2 Laporan x 3 Katim) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	6 Laporan (2 Laporan x 3 Katim) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	6 Laporan (2 Laporan x 3 Katim) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	6 Laporan (2 Laporan x 3 Katim) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	6 Laporan (2 Laporan x 3 Katim) - Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD - Sinkronisasi Renja dengan RKPD	#####	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	4 dokumen 1. Rancangan Renja Murni 2. Renja Murni 3. Rancangan Renja Perubahan 4. Renja Perubahan	#####	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23 Laporan	23 Laporan	#####	23 Laporan	#####	23 Laporan	#####	23 Laporan	#####	23 Laporan	#####	

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	2 dokume	11 dokumen	#####	12 dokumen	#####	11 dokumen	#####	12 dokumen	#####	12 dokumen	#####	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen - Renja Murni - Renja Perubahan - DPA - RKA	#####	5 Dokumen - Renja Murni - Renja Perubahan - DPA - RKA - Revisi Renstra	#####	4 Dokumen - Renja Murni - Renja Perubahan - DPA - RKA	#####	5 Dokumen - Renja Murni - Renja Perubahan - DPA - RKA - Revisi Renstra	#####	5 Dokumen - Renja Murni - Renja Perubahan - DPA - RKA - Revisi Renstra	#####	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan - LKIP - PK - Data dukung LPPD dan LKPJ	#####	3 Laporan - LKIP - PK - Data dukung LPPD dan LKPJ	#####	3 Laporan - LKIP - PK - Data dukung LPPD dan LKPJ	#####	3 Laporan - LKIP - PK - Data dukung LPPD dan LKPJ	#####	3 Laporan - LKIP - PK - Data dukung LPPD dan LKPJ	#####	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan - Laporan P5D - Laporan Evaluasi Kinerja - Laporan SKM - Laporan RB	#####	4 Laporan - Laporan P5D - Laporan Evaluasi Kinerja - Laporan SKM - Laporan RB	#####	4 Laporan - Laporan P5D - Laporan Evaluasi Kinerja - Laporan SKM - Laporan RB	#####	4 Laporan - Laporan P5D - Laporan Evaluasi Kinerja - Laporan SKM - Laporan RB	#####	4 Laporan - Laporan P5D - Laporan Evaluasi Kinerja - Laporan SKM - Laporan RB	#####	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	#####	3 laporan	#####	3 laporan	#####	3 laporan	#####	3 laporan	#####	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	54 Orang/bulan	#####	54 Orang/bulan	#####	54 Orang/bulan	#####	54 Orang/bulan	#####	54 Orang/bulan	#####	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	#####	1 Laporan	#####	1 Laporan	#####	1 Laporan	#####	1 Laporan	#####	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan	#####	19 Laporan	#####	19 Laporan	#####	19 Laporan	#####	19 Laporan	#####	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Dokumen	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	54 Orang	#####	55 Orang	#####	55 Orang	#####	55 Orang	#####	55 Orang	#####	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah	8 layanan	8 Laporan	#####	8 Laporan	#####	8 Laporan	#####	8 Laporan	#####	8 Laporan	#####	

Kode	Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
		Keluaran		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	#####	3 Paket	#####	3 Paket	#####	3 Paket	#####	3 Paket	#####	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	2 Paket	#####	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	4 Dokumen	#####	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	2 Dokumen	#####	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun	59 Unit	25 Unit	#####	17 Unit	#####	18 Unit	#####	23 Unit	#####	20 Unit	#####	
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	59 Unit	25 Unit	#####	17 Unit	#####	18 Unit	#####	23 Unit	#####	40 Unit	#####	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	3 Laporan	2 Laporan	#####	2 Laporan	#####	2 Laporan	#####	2 Laporan	#####	2 Laporan	#####	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	4 Laporan	#####	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12 Laporan	#####	12 Laporan	#####	12 Laporan	#####	12 Laporan	#####	12 Laporan	#####	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam satu tahun	104 Unit	104 Unit	#####	104 Unit	#####	104 Unit	#####	104 Unit	#####	104 Unit	#####	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	27 Unit	#####	27 Unit	#####	27 Unit	#####	27 Unit	#####	27 Unit	#####	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1 Unit	#####	1 Unit	#####	1 Unit	#####	1 Unit	#####	1 Unit	#####	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	102 Unit	#####	102 Unit	#####	102 Unit	#####	102 Unit	#####	102 Unit	#####	



Secara garis besar banyaknya program, kegiatan dan subkegiatan di atas disimplifikasi oleh 3 program yang menjadi *driving force* pembangunan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.4. Program Pembangunan Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dinilai baik apabila telah memenuhi prinsip SMART yang merupakan



singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded*.

- ***Specific***

Mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.

- ***Measurable***

Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.

- ***Agreeable***

Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.

- ***Realistic***

Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.

- ***Time-bounded***

Memiliki batas waktu pencapaian.

Selain itu IKU juga harus mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi, pemilihan IKU juga harus didasarkan pada focus dan prioritas utama organisasi. Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 mengacu pada Tugas pokok dan fungsinya serta mendorong tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator ini merupakan parameter kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.5 Keselarasan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 Dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (General dan Tematik)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi (General)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Dalam Tabel 4.5 dijelaskan bahwa Sasaran Bappeda untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah tentu berpengaruh besar terhadap Sasaran Daerah dalam meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Begitu pula dengan Indikator Sasaran Bappeda yaitu Indeks Perencanaan Daerah merupakan salah satu Indikator Keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi Daerah pada area Akuntabilitas Kinerja.

Penentuan Target Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan telah disesuaikan dengan Target Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Bekasi. Target Indikator Sasaran Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Target Indikator Sasaran Renstra Bappeda tahun 2025-2029

No	Indikator Sasaran	Base line (2024)	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	86,60	88.65	88.70	88.75	88.80	88.85

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

Dari *Key performance Indicator* di atas kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja lebih detail dan rinci. indikator kinerja kunci Bappeda terdiri dari 7 indikator yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bappeda tahun 2025-2029

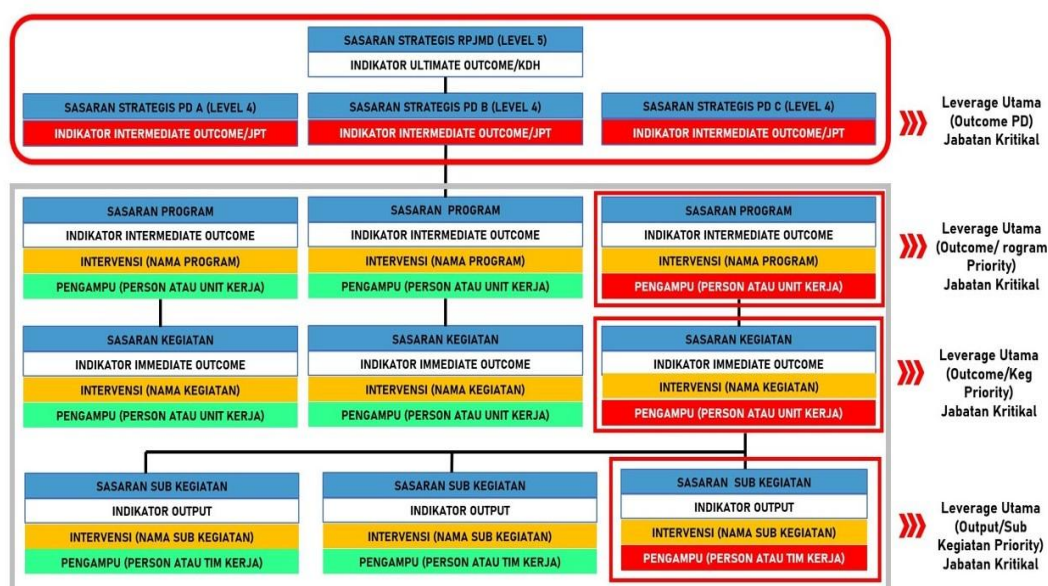
No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	88.65	88.70	88.75	88.80	88.85	88.90
2	persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025

Kinerja Perangkat daerah dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama. Penurunan/Pemetaan Indikator Kinerja Utama (cascading IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU berdasarkan *logic model* penurunan kinerja organisasi.



Gambar 4.2 Alur Proses Cascading Kinerja/ Sasaran Perangkat Daerah



B A B

5

PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bekasi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Bekasi. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kabupaten Bekasi.

Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bekasi, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bekasi.